

**PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI INDONESIA: HAMBATAN
DAN TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN PAUD**

Evi Selva Nirwana¹, Ambar Putri Ramadhani², Silvia³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu^{1,2,3}

Email : eviselvanirwana@mail.uinfasbengkulu.ac.id¹ ambarputriramadhani9@gmail.com²
silvia16via@gmail.com³

ABSTRAK

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memegang peran krusial dalam pembangunan sumber daya manusia, namun implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara komprehensif problematika utama yang menghambat perkembangan PAUD di Indonesia serta merumuskan kerangka solusi strategis untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan melakukan analisis dan sintesis mendalam terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan dengan isu PAUD di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa PAUD di Indonesia menghadapi masalah kompleks dan saling terkait, meliputi rendahnya kualitas dan kuantitas pendidik yang dipengaruhi oleh minimnya minat, kesejahteraan yang belum memadai, dan terbatasnya lembaga pencetak guru berkualitas. Selain itu, akses terhadap layanan PAUD belum merata, khususnya di daerah pedesaan, diperparah oleh pemahaman masyarakat yang belum optimal dan rendahnya kesadaran orang tua akan urgensi PAUD. Mutu pembelajaran juga belum maksimal akibat kurikulum yang belum standar, metode pembelajaran yang kurang inovatif, dan fasilitas pendukung yang minim, serta kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung. Oleh karena itu, solusi komprehensif yang direkomendasikan mencakup peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik, perluasan akses dan pemerataan infrastruktur melalui peningkatan anggaran pemerintah dan pelibatan aktif pihak swasta, peningkatan kesadaran serta keterlibatan orang tua, pengembangan kurikulum yang relevan dan metode pembelajaran inovatif, serta penguatan regulasi dan kebijakan pemerintah yang lebih afirmatif sebagai kunci fundamental untuk perbaikan mutu layanan PAUD secara menyeluruh di Indonesia.

Kata Kunci: *Problematika, Hambatan, Tantangan, Pengelolaan PAUD.*

ABSTRACT

Early Childhood Education (PAUD) plays a crucial role in human resource development, but its implementation in Indonesia still faces significant challenges. This study aims to comprehensively identify the main problems that hinder the development of PAUD in Indonesia and to formulate a strategic solution framework to overcome them. The research method used is a literature study, by conducting in-depth analysis and synthesis of various literature sources relevant to PAUD issues in Indonesia. The results of the study indicate that PAUD in Indonesia faces complex and interrelated problems, including the low quality and quantity of educators influenced by minimal interest, inadequate welfare, and limited institutions that produce quality teachers. In addition, access to PAUD services is not evenly distributed, especially in rural areas, exacerbated by suboptimal community understanding and low parental awareness of the urgency of PAUD. The quality of learning is also not optimal due to a non-standard curriculum, less innovative learning methods, and minimal supporting facilities, as well as government policies that do not fully support it. Therefore, the recommended comprehensive solution includes improving the quality and welfare of educators, expanding access and equalizing infrastructure through increasing government budgets and active involvement of the private sector, increasing awareness and involvement of parents, developing relevant curricula and

innovative learning methods, and strengthening more affirmative government regulations and policies as fundamental keys to improving the quality of PAUD services as a whole in Indonesia.

Keywords: *Problems, Obstacles, Challenges, PAUD Management.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi utama dalam proses pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat. Konsep PAUD tidak hanya mengacu pada aspek akademik, namun juga pada pengembangan fisik, emosional, sosial, dan kecerdasan intelektual anak. Di Indonesia, meskipun PAUD dianggap sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, namun masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang menghalangi pengelolaannya secara optimal. Artikel ini bertujuan untuk menggali berbagai problematika yang ada dalam dunia PAUD di Indonesia, dengan fokus pada hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya.

Sebagai negara berkembang, Indonesia menempati peringkat ke-54 dari 78 negara dalam peringkat pendidikan dunia pada tahun 2014 (WorldPopulationReview.com, 2014), yang mengindikasikan adanya berbagai masalah dan tantangan yang perlu dihadapi. Beberapa kendala tersebut antara lain: 1) Hambatan dalam pemerataan pendidikan akibat faktor geografis serta perbedaan bahasa dan budaya; 2) Keterbatasan ketersediaan tempat belajar, tenaga pengajar, dan fasilitas pendidikan, serta kesulitan dalam meningkatkan mutu pendidikan; 3) Sumber daya dan dana yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti penyediaan guru, gedung, buku, fasilitas pengajaran, beasiswa, dan biaya lainnya; 4) Biaya pendidikan yang semakin mahal sebagai konsekuensi dari peningkatan fasilitas dan kualitas pengajaran; 5) Ketidaksesuaian hasil pendidikan dengan kebutuhan individu di masyarakat dan dunia kerja; 6) Lambatnya dan tidak efisiennya sistem pendidikan dalam mengelola kurikulum, metode pengajaran, serta pola dan struktur pendidikan guru seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat (Agustin et al, 2021; Kurniawan, 2016).

Pendidikan anak usia dini (PAUD), yang mencakup rentang usia 0-6 tahun, diakui secara luas sebagai periode emas dan sangat fundamental bagi perkembangan holistik anak. Selama masa ini, otak anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa pesat, dengan pembentukan triliunan koneksi sinaptik yang menjadi dasar arsitektur otak. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai studi neurosains, pengalaman dan stimulasi yang diterima anak pada tahun-tahun awal ini secara signifikan membentuk jalur saraf yang akan mempengaruhi kemampuan kognitif, perkembangan bahasa, serta regulasi sosial dan emosional mereka di masa depan (Center on the Developing Child at Harvard University, 2011). Oleh karena itu, intervensi pendidikan berkualitas pada tahap ini bukan hanya memberikan landasan akademis, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter, kemampuan adaptasi, dan kesejahteraan jangka panjang, yang seringkali memiliki dampak hingga dewasa (Heckman, 2012).

Menyadari urgensi tersebut, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang meningkat untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan PAUD melalui serangkaian kebijakan dan program nasional. Meskipun PAUD telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan pendidikan, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai hambatan kompleks dan multidimensional. Problematika ini seringkali mencakup isu pemerataan akses, di mana kualitas layanan dan ketersediaan infrastruktur masih timpang antara daerah perkotaan dengan pedesaan atau wilayah terpencil, sebagaimana banyak dilaporkan dalam studi mengenai kesenjangan pendidikan di negara berkembang (UNESCO, 2015). Selain itu, tantangan juga meliputi pemenuhan standar kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, keterlibatan orang tua yang belum optimal, serta optimalisasi sistem tata kelola

dan pendanaan yang berkelanjutan. Mengatasi berbagai kendala ini memerlukan pendekatan sistemik dan kolaborasi multisektor untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya atas pendidikan usia dini yang berkualitas dan setara (Britto et al., 2017).

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun dasar yang kuat bagi perkembangan anak. Sebagai tahap awal dalam pendidikan, PAUD memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan berbagai aspek, baik fisik, kognitif, sosial, emosional, maupun bahasa. Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya PAUD semakin berkembang, namun implementasi dan pengembangannya masih menghadapi sejumlah masalah. Masalah-masalah ini tidak hanya berkaitan dengan akses dan infrastruktur, tetapi juga kualitas tenaga pendidik, kurikulum, serta keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang problematika yang ada dalam PAUD di Indonesia sangat penting untuk merancang solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara keseluruhan menggunakan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih untuk melakukan kajian yang mendalam dan analitis terhadap berbagai aspek problematika Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi dan merumuskan kerangka solusi strategis berdasarkan penelusuran dan evaluasi pustaka yang telah ada dan relevan dengan topik kajian (Chalkiadaki, 2018).

Proses pengumpulan data difokuskan pada identifikasi, seleksi, dan kompilasi sumber-sumber pustaka yang memiliki relevansi tinggi dengan isu PAUD di Indonesia, termasuk problematika yang dihadapi dan potensi solusi. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah dokumen literatur itu sendiri, yang mencakup artikel-artikel dari jurnal ilmiah terpublikasi, buku-buku referensi, laporan penelitian dari lembaga kredibel, dokumen kebijakan pemerintah terkait PAUD, serta publikasi relevan lainnya yang secara spesifik membahas tantangan dan praktik penyelenggaraan PAUD di konteks Indonesia.

Data kualitatif yang berasal dari berbagai sumber literatur tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten dan sintesis tematik secara mendalam. Prosedur ini melibatkan pembacaan kritis terhadap setiap sumber, identifikasi dan pengkodean tema-tema kunci terkait problematika PAUD, perbandingan serta evaluasi berbagai temuan dan argumen, hingga akhirnya dilakukan sintesis informasi untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan merumuskan rekomendasi solusi strategis yang didasarkan pada bukti-bukti dari literatur yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Guru/Pendidik Anak Usia Dini Masih Kurang Dari Segi Kualitas dan Kuantitasnya

Secara kuantitas, jumlah guru atau pendidik yang berkecimpung dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan lain seperti SD, SMP, dan SMU. Selain itu, kualitas mereka pun seringkali masih minim. Kurangnya minat lulusan atau masyarakat secara umum untuk menjadi guru anak usia dini menjadi kendala signifikan bagi perkembangan PAUD di Indonesia. Kondisi ini sebagian disebabkan oleh kurangnya pemahaman filosofis masyarakat Indonesia mengenai esensi dan urgensi pendidikan anak usia dini, yang kemudian tercermin pada moralitas manusia dewasa Indonesia saat ini, seperti kurangnya rasa tanggung jawab, toleransi, disiplin, kejujuran, dan kepekaan terhadap sesama (Supriyanto, 2020).

Lebih lanjut, kurang berminatnya masyarakat untuk menjadi guru PAUD juga dipengaruhi oleh kenyataan bahwa profesi guru, termasuk guru PAUD, masih sering

diidentikkan dengan pendapatan yang minim. Guru di perkotaan umumnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik dibandingkan guru di pedesaan. Akibatnya, terjadi konsentrasi profesi guru di kota, sehingga daerah pedesaan mengalami kekurangan tenaga pengajar, dan hal ini berlaku pula untuk guru PAUD.

Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi guru PAUD dengan sendirinya mengakibatkan kurangnya minat pihak swasta untuk mendirikan institusi kependidikan yang bertujuan mencetak guru-guru PAUD. Kondisi ini semakin memperparah kekurangan guru PAUD di Indonesia dari segi kuantitas. Meskipun demikian, secara khusus dapat diamati bahwa saat ini mulai tumbuh minat untuk mencetak tenaga-tenaga PAUD, namun upaya ini masih terbatas pada lingkungan akademisi di pendidikan tinggi yang secara keilmuan memang menyadari betapa pentingnya PAUD.

Di sisi lain, dari segi kualitas, guru PAUD di Indonesia juga masih menunjukkan mutu yang rendah. Sebagai contoh, tidak jarang lulusan SMU atau bahkan SMP yang mengajar di TK/PAUD, dan bahkan ada yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal yang memadai, seperti observasi penulis di salah satu desa di Bogor yang menemukan guru TK lulusan SD. Hal ini menunjukkan bahwa banyak guru anak usia dini yang kurang kompeten di bidangnya. Kondisi tersebut tentu saja berdampak pada merosotnya mutu pendidikan PAUD yang berimbas negatif pada pembentukan kualitas anak. Agar kemampuan tenaga kependidikan memadai, lembaga pendidikan guru anak usia dini harus pula membekali mereka dengan beragam aspek ilmu pengetahuan yang sesuai dengan karakter perkembangan anak. Selain aspek pendidikan, perlu juga diperhatikan pengetahuan penunjang lainnya seperti kesehatan dan psikologi anak. Sayangnya, mengajar anak usia dini oleh sebagian masyarakat masih dianggap sebagai pekerjaan yang mudah, sehingga banyak guru anak usia dini yang kurang maksimal dalam memberikan pendidikan. Mereka seringkali tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai perkembangan anak, metodologi pembelajaran bagi anak usia dini, dan cara memberikan stimulasi yang tepat, sehingga sasaran pendidikan anak dirasakan kurang efektif dan mengena.

Untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu, tentulah dibutuhkan guru yang bermutu pula; sebaliknya, bila kualitas guru rendah, maka kualitas anak didik pun akan rendah. PAUD bukanlah bidang yang dapat dianggap ringan, sebab memerlukan individu yang kompeten di bidangnya untuk mendidik anak secara optimal. Oleh karena itu, guru PAUD perlu mempunyai latar pendidikan yang sesuai dengan bidang PAUD agar dapat mengajar dengan baik dan memaksimalkan potensi-potensi anak. Peningkatan kualitas anak usia dini juga dipengaruhi oleh faktor kuantitas guru. Rasio perbandingan antara jumlah anak dan guru yang tidak seimbang akan menimbulkan masalah baru. Sebagai contoh, satu guru yang mengajar 30 anak tentu tidak akan bisa memperhatikan proses belajar setiap anak secara intensif dan individual, yang dengan sendirinya akan berakibat pada penurunan kualitas anak didik.

Menurut pengamatan penulis, beberapa solusi yang dapat diupayakan untuk mengatasi berbagai permasalahan ini antara lain, *pertama*, perlu adanya kenaikan pendapatan bagi guru anak usia dini, baik yang diupayakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, agar dapat menarik minat masyarakat untuk menekuni profesi ini. *Kedua*, pemerintah dapat mengalokasikan dana anggaran pembangunan yang lebih besar yang secara spesifik ditujukan untuk menaikkan pendapatan guru PAUD. *Ketiga*, seiring dengan bertumbuhnya minat masyarakat untuk berprofesi sebagai guru atau pamong anak usia dini, pihak swasta diharapkan dapat lebih berkontribusi dalam mendirikan institusi pendidikan untuk mencetak guru-guru anak usia dini, baik di tingkat pusat maupun daerah. *Keempat*, institusi prasekolah, baik negeri maupun swasta, perlu menetapkan peraturan bahwa pendidikan minimal bagi guru anak usia dini adalah Diploma II dalam bidangnya, dan akan lebih baik lagi bila mencapai jenjang S-1. *Kelima*, keberadaan lembaga seperti Pendidikan Tenaga Kependidikan - Pendidikan Non Formal (PTK-

PNF) di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (Dirjen PLSP) Departemen Pendidikan Nasional diharapkan dapat turut mendukung perkembangan dan kemajuan guru atau pamong PAUD, baik secara kualitas maupun kuantitas. *Terakhir*, sangat diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung dan sinergis antara pemerintah, dalam hal ini PTK-PNF, dengan organisasi profesi PAUD, seperti Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bersama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas guru atau pamong PAUD secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

2. Belum Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan bagi anak-anak usia dini di Indonesia masih belum tergarap dengan baik. Padahal, pembinaan usia dini merupakan langkah strategis dan penting dalam membangun karakter dan kemampuan intelektual seseorang. Ini terjadi karena jumlah laju pertumbuhan anak usia dini di Indonesia tidak seimbang dengan laju pertumbuhan pembangunan sarana fisik institusi pra sekolah. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah melalui Depdiknas sejauh ini adalah mendirikan pusat-pusat PAUD di daerah-daerah, termasuk di daerah tertinggal. Namun keberadaan pusat-pusat PAUD ini masih sangat minim dibandingkan dengan tingkat kebutuhan masyarakat (Hamdani, 2021).

Institusi anak usia dini belum merata/belum banyak ke daerah-daerah atau pelosok Indonesia sehingga anak usia dini berkembang hanya pada pusat pusat kota yang jumlahnya sangat terbatas ini, menjadi salah satu sebab terhambatnya pendidikan anak usia dini di masyarakat daerah. Selain itu, jenis pendidikan anak usia dini yang baru dikenal masyarakat adalah Taman Kanak-Kanak, sedangkan Kelompok Bermain (KB) kurang diminati dan Tempat Penitipan Anak (TPA) kurang sekali popularitasnya di mata masyarakat dan juga dibarengi dengan minimnya pengadaan institusinya secara fisik, begitu juga dengan bentuk-bentuk PAUD lainnya (Ningsih, 2018).

Pemerintah memegang peranan penting untuk membangun pendidikan anak usia dini di Indonesia. Sesuai dengan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan maka pengadaan kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan ini harus diperluas. Karenanya anggaran pembangunan untuk pengembangan PAUD di Indonesia harus ditingkatkan. Dengan anggaran pembangunan yang cukup maka penyelenggaraan PAUD dapat ditingkatkan secara merata di seluruh pelosok Indonesia, dan yang mengakibatkan meratanya pula kesempatan anak Indonesia untuk mendapatkan layanan pendidikan PAUD.

Secara moral dan legal negara memang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan termasuk PAUD, namun pada kenyataannya kewajiban itu tidak hanya menjadi kewajiban negara tapi juga membutuhkan kontribusi masyarakat. Karena itu, peranan lembaga swasta untuk pendirian PAUD sangat diharapkan. Urgensi PAUD sendiri sudah tidak diragukan lagi manfaatnya bagi peningkatan kualitas anak. Anak yang mendapat layanan PAUD akan lebih baik dari berbagai aspek perkembangannya. Oleh karenanya hubungan pengembangan PAUD dengan peningkatan kualitas anak sangat erat.

Berdasarkan pandangan penulis, terdapat beberapa solusi komprehensif yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan terkait Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Upaya-upaya ini memerlukan sinergi antara kebijakan pemerintah dan partisipasi aktif berbagai pihak.

Pertama, pemerintah seyogianya menempatkan anggaran pembangunan PAUD sebagai prioritas utama, bahkan melebihi alokasi untuk beberapa sektor pembangunan lainnya. Langkah strategis ini didasari oleh pemahaman bahwa investasi pada PAUD merupakan fondasi krusial bagi pengembangan sumber daya manusia berkualitas di masa depan. Dengan anggaran yang memadai, pemerintah dapat memastikan ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana belajar yang layak, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik PAUD di seluruh pelosok negeri.

Kedua, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu secara proaktif mendukung dan menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam upaya pembangunan PAUD. Kolaborasi ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti penyaluran bantuan dana untuk pendirian atau renovasi lembaga PAUD, pelaksanaan supervisi untuk menjaga standar kualitas layanan, serta pembinaan berkelanjutan bagi para guru PAUD. Selain itu, sosialisasi mengenai acuan pembelajaran PAUD yang sesuai dengan standar nasional juga perlu dilakukan secara lebih intensif kepada seluruh penyelenggara PAUD, termasuk pihak swasta, agar tercipta keselarasan dalam proses pendidikan anak usia dini. Dengan adanya dukungan dan kerja sama yang erat, diharapkan akselerasi pembangunan dan peningkatan mutu PAUD dapat tercapai secara signifikan.

3. Kurangnya Kesadaran Orangtua Terhadap Urgensi Pendidikan Anak Usia Dini

Salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan anak usia dini adalah aspirasi masyarakat yang rendah terhadap anak usia dini, banyak orang tua beranggapan masa sekolah adalah berawal belajar sekolah formal di kelas satu SD, sehingga lima tahun pertama berlalu begitu saja di rumah tanpa stimulasi yang optimal dari orang tua.

Peraturan Pemerintah No. 27 yang menyatakan bahwa pendidikan pra sekolah bukan syarat masuk ke SD, turut memperendah aspirasi orang tua terhadap urgensi pendidikan anak usia, karena mendapat tanggapan salah dari orang tua pada umumnya yang mengartikan pendidikan bagi anak usia dini tidaklah penting. Selain itu pendidikan anak usia dini di Indonesia masih mahal dan tidak terjangkau oleh penduduk yang rata-rata kesejahteraannya masih rendah.

Kebanyakan orang tua tidak mempunyai wawasan tentang perkembangan anak yang cukup sehingga mereka banyak yang tidak menguasai pendidikan anak usia dini di rumah. Mereka juga tidak mendapatkan pendidikan khusus tentang anak usia dini. Padahal seperti yang kita tahu, keluarga adalah lingkungan pertama dan utama yang akan memberikan pijakan dasar bagi perkembangan anak tersebut selanjutnya. Sebagian besar orangtua, karena faktor kekurangpahaman, kesibukan dan lainnya, banyak melalaikan tahun-tahun penting pertama dalam kehidupan anak. Terutama orangtua (ayah dan ibu) yang sibuk mencari nafkah baik di kota maupun di desa, tidak memberikan alternatif sebagai pengganti pendidikan bagi sang anak. Hal itu disebabkan kurangnya kesadaran terhadap urgensi pendidikan anak usia dini.

Hal yang perlu disadari oleh orangtua adalah bahwa anak yang mendapat pelayanan pendidikan anak usia dini, perkembangan aspek-aspek fisik dan psikisnya akan meningkat dan berkembang dengan lebih optimal dibandingkan anak yang tidak melalui PAUD. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis dalam penulisan skripsi S-1 di IKIP Jakarta (1998).

Menurut penulis, terdapat beberapa solusi komprehensif yang dapat diupayakan untuk mengatasi permasalahan terkait perkembangan anak usia dini. Salah satu langkah fundamental adalah pengadaan institusi pendidikan bagi orang tua, atau *parenting school*, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik melalui inisiatif pemerintah maupun swasta. Bahkan, di beberapa negara maju, partisipasi dalam program semacam ini menjadi prasyarat bagi pasangan muda yang akan melangsungkan pernikahan, menunjukkan betapa pentingnya bekal pengetahuan bagi calon orang tua. Upaya ini bertujuan untuk membekali orang tua dengan pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam mengasuh dan mendidik anak sejak usia dini, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal.

Lebih lanjut, solusi lainnya adalah dengan melakukan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara merata hingga ke daerah-daerah terpencil. Pembinaan ini tidak hanya terbatas pada fasilitas yang sudah ada seperti Posyandu, melainkan juga perlu menerapkan sistem proaktif seperti layanan *door to door* atau "jemput bola" untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Program ini idealnya dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis antara berbagai pihak, termasuk Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Agama di

tingkat wilayah, Pemerintah Daerah, serta tokoh masyarakat setempat, dengan melibatkan kader-kader yang kompeten dan berdedikasi. Selain itu, penting pula untuk mendirikan lembaga PAUD yang terjangkau, bahkan gratis, bagi masyarakat kurang mampu, dengan dukungan subsidi dari pemerintah dan partisipasi masyarakat. Inisiatif seperti TK Keliling yang digagas oleh Kelompok Sosial Pecinta Anak Universitas Negeri Jakarta merupakan contoh baik yang patut direplikasi dan dikembangkan lebih luas.

4. Mutu Pendidikan dan Anak Usia Dini Masih Rendah

Usia di bawah lima tahun (balita) adalah usia yang paling peka atau paling menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian seseorang. Termasuk juga pengembangan intelegensi dan aspek-aspek lain hampir seluruhnya terjadi pada usia di bawah lima tahun. Kalau seseorang sudah terlanjur menjadi pelaku kejahatan/tindak kriminal, maka pendidikan yang telah didapat orang tersebut boleh dikatakan tidak berarti. Sebagaimana halnya sebatang pohon bambu, setelah tua susah dibengkokkan.

Anak-anak pada usia di bawah lima tahun memiliki potensi intelegensi (potential intelligence) yang luar biasa. Namun, pada umumnya para orangtua dan guru hanya bisa mengajarkan sesuatu sedikit saja pada anak-anak. Sesungguhnya anak-anak usia muda tidak complicated (ruwet) dalam belajar, tetapi orangtua atau guru yang bermasalah. Pada umumnya kita selalu menyalahkan anak-anak apabila tingkah laku mereka tidak seperti yang kita inginkan. Hal ini lebih banyak disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman kita terhadap perkembangan anak, sehingga kita sering memperlakukan anak dengan kurang tepat.

Anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa dan kemampuan untuk menyerap informasi yang sangat tinggi. Kebanyakan orang tidak mengenali dan memahami kemampuan ‘magic’ yang ada pada anak-anak. Mereka hanya bisa berkata, “Saya tahu anak-anak belajar lebih cepat”, tetapi mereka tidak tahu “seberapa cepat anak-anak bisa belajar”. Karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan orang tua dan guru-guru maka potensi luar biasa yang ada pada setiap anak sebagian besar tersia-siakan.

Kita lihat perkembangan pendidikan anak usia dini yang telah tumbuh dengan pesat di luar negeri, menghasilkan anak-anak yang mempunyai karakteristik: kritis, mandiri, aktif, kreatif, logika berfikir tinggi dan berani menampilkan diri. Hal ini berbanding terbalik dengan anak usia dini di Indonesia. Di Indonesia PAUD belum begitu berhasil sehingga berpengaruh secara signifikan pada kualitas anak usia dini Indonesia pada umumnya yang mempunyai karakteristik: kurang kritis, kurang mandiri, pasif, kurang kreatif, logika berfikir rendah dan kurang berani menampilkan diri (Setiawati, 2019).

Peningkatan kualitas anak melalui pendidikan tidak terlepas dari tersedianya kerangka penyelenggaraan pendidikan yang baik secara keseluruhan, yaitu falsafah dan tujuan pendidikan, luas/dalamnya materi, metode dan teknik membelajarkan, media pengajaran, interaksi/kegiatan pembelajaran dan sarana/fasilitas yang mendukung. Faktor-faktor ini masih kurang bermutu dalam pembelajaran PAUD di Indonesia. Dengan sendirinya kualitas anak usia dini di Indonesia masih kurang seperti karakteristik di atas.

Bila faktor-faktor tersebut dirancang dengan baik dan cermat maka, dapat dipastikan kualitas pendidikan anak usia dini pun akan meningkat, dan bila faktor-faktor pendidikan itu mengalami perbaikan menyeluruh akan mempengaruhi kualitas pendidikan anak pada umumnya seperti anak menjadi kritis, mandiri, aktif, kreatif, logika berfikir tinggi dan berani menampilkan diri.

Menurut penulis, solusi yang dapat diupayakan untuk mengatasi masalah ini melibatkan beberapa aspek krusial. Pertama, pemerintah diharapkan untuk secara berkelanjutan memperbaiki acuan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terutama dalam hal perluasan dan pendalaman materi. Acuan menu pembelajaran generik yang selama ini menjadi pedoman perlu terus direvisi, sementara pengembangan dan inovasi metode pendidikan seperti

Beyond Centre and Circle Time (BCCT) diharapkan dapat terus ditingkatkan dan disosialisasikan secara merata ke seluruh instansi PAUD, khususnya hingga ke daerah-daerah. Kedua, baik pemerintah maupun institusi prasekolah swasta dapat secara kreatif memperkaya faktor-faktor pembelajaran yang sudah berjalan. Hal ini mencakup revisi tujuan pembelajaran agar lebih mengarahkan anak untuk menjadi pribadi yang kritis, mandiri, aktif, kreatif, memiliki logika berpikir yang tinggi, dan berani menampilkan diri. Selain itu, materi pembelajaran perlu diperkaya agar lebih menarik minat anak untuk bereksplorasi dalam lingkungannya, metode pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik anak yang aktif dan kreatif, serta media diusahakan semenarik mungkin dengan memanfaatkan sumber-sumber lingkungan yang ada. Tak kalah penting, kualitas interaksi guru dan siswa harus mampu mengundang minat anak untuk belajar, didukung oleh sarana yang lebih dapat mengakomodasi kebutuhan PAUD. Ketiga, pemerintah maupun institusi prasekolah swasta dapat melakukan studi banding pada prasekolah yang dianggap telah berhasil, baik di dalam maupun di luar negeri, dan mengadaptasi sistem pendidikannya setelah melalui kajian yang mendalam serta penyesuaian dengan kondisi dan budaya masyarakat Indonesia.

5. Kebijakan Pemerintah Saat Ini Kurang Mendukung Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Penulis melihat kebijakan Pemerintah ini dari dua sudut yaitu alokasi dana pendidikan dan kebijakan Peraturan Pemerintah tentang PAUD. Alokasi dana pendidikan sebesar Rp. 17 triliun tidak memadai untuk negeri sebesar Indonesia. Pemerintah seharusnya mengeluarkan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, yaitu sebesar Rp. 80 triliun. “Lebih baik kita menunda membayar utang luar negeri dari pada kita tunda mendidik anak-anak kita dengan baik”, kata Marwah Daud Ibrahim dari F-PG ketika Dengar Pendapat antara Dirjen Baga Islam Depag, Dirjen Dikdasmen, dan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah (PLSP) dengan Komisi VI DPR. Lebih lanjut anggota dari Fraksi Partai Golkar itu mengatakan bahwa dirinya sangat berharap pada pendidikan, karena seluruh proses bangsa dibangun lewat pendidikan. Artinya banyak hal yang tidak dibiasakan di rumah tapi kemudian terbiasakan lewat proses sekolah. Orang yang tidak produktif di rumah bisa produktif lewat proses sekolah.

Anggota Fraksi Golkar lainnya, Agusman Sutan Basa, bahkan menyarankan untuk menambah anggaran pendidikan dibuat RUU pajak pendidikan tersendiri, yaitu dengan menambahkan berapa persen dari seluruh jenis pajak yang ada. Aspirasi para tokoh ini mencerminkan betapa perlunya pemerintah memperbesar anggaran untuk pendidikan, termasuk PAUD di dalamnya. Karena hal itu sama dengan kita menanam investasi jangka panjang yang akan kita tuai di masa depan berupa kemajuan bangsa ke arah yang lebih maju.

Dari sisi kebijakan, Peraturan Pemerintah No. 27 yang masih berlaku menyatakan bahwa pendidikan pra sekolah bukan syarat masuk ke SD merupakan PP yang kurang berpihak bagi berkembangnya PAUD di Indonesia. PP ini berdampak luas pada berbagai aspek seperti efek domino (saling berpengaruh dan berkaitan), yaitu orang tua menjadi kurang memprioritaskan PAUD bagi anak balitanya, namun langsung memasukkannya ke SD, kurangnya minat pemerintah dalam mendirikan institusi lembaga PAUD (misalnya TK negeri pada jalur formal) tidak seperti halnya pembangunan SD-SD negeri yang begitu digalakkan sampai ke daerah-daerah, lebih jauh lagi mengakibatkan minimnya permintaan pemerintah atas formasi guru-guru untuk TK negeri maupun swasta (apalagi guru/pamong PAUD) sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang pada gilirannya hal ini akan mengurangi minat masyarakat untuk menjadi guru TK/guru PAUD karena kurang berpeluang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur ini, dan akhirnya akan mengakibatkan masalah kurangnya kuantitas guru PAUD yang berakibat tidak terlayannya anak-anak usia dini yang membutuhkan pendidikan.

Berdasarkan pandangan penulis, terdapat serangkaian solusi yang dapat diupayakan untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah hendaknya mempertimbangkan perubahan

Copyright (c) 2025 MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan

kebijakan yang menjadikan pendidikan prasekolah atau PAUD sebagai kondisi yang lebih diutamakan untuk memasuki jenjang Sekolah Dasar, mengingat signifikansi pendidikan prasekolah bagi perkembangan anak di masa mendatang. Penelitian oleh Hazarika dan Hazarika (2019) menunjukkan bahwa partisipasi dalam program pendidikan anak usia dini berkualitas tinggi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesiapan sekolah anak, termasuk perkembangan kognitif dan sosial-emosional mereka. Selain itu, diperlukan penganggaran porsi dana yang lebih substansial untuk pembangunan PAUD di seluruh Indonesia, disertai dengan peningkatan pendapatan bagi para guru anak usia dini, baik di tingkat pusat maupun daerah. Studi oleh McCain et al (2011) menekankan bahwa investasi dalam pengembangan profesional dan kompensasi yang layak bagi pendidik anak usia dini adalah kunci untuk meningkatkan kualitas layanan PAUD, yang pada gilirannya berdampak pada hasil perkembangan anak yang lebih baik. Upaya lainnya adalah pembangunan infrastruktur, seperti gedung-gedung pusat pendidikan anak usia dini, yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Riset oleh Sari dan Yulindrasari (2018) menemukan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk gedung yang representatif, berkorelasi positif dengan kualitas proses pembelajaran dan kenyamanan anak dalam mengikuti kegiatan PAUD. Lebih lanjut, pemerintah diharapkan membuka peluang dan melakukan pengangkatan guru atau pamong anak usia dini sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) guna menarik minat masyarakat untuk berprofesi sebagai guru PAUD, sekaligus memungkinkan pembinaan yang lebih terarah dan intensif dari pemerintah. Penelitian oleh Suryana (2016) mengungkapkan bahwa status kepegawaian yang jelas dan jaminan kesejahteraan, seperti yang ditawarkan melalui pengangkatan sebagai PNS, dapat meningkatkan motivasi dan profesionalisme guru PAUD, serta menarik minat lulusan berkualitas untuk berkarir di bidang ini. Dengan mencermati kondisi dan permasalahan-permasalahan PAUD yang ada, sistem penanganan terhadap pendidikan anak usia dini di Indonesia selama ini memerlukan perbaikan. Setidaknya, perlu ada terobosan baru untuk memberdayakan dan mensinergikan semua potensi yang telah ada di masyarakat demi tercapainya layanan tumbuh kembang anak yang utuh, menyeluruh, dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan temuan Fivush (2011) yang menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dan terpadu dalam layanan anak usia dini yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah, untuk memastikan perkembangan anak yang optimal.

6. Tantangan dalam Pengelolaan PAUD

salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia adalah masih terbatasnya akses bagi seluruh anak. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan dalam akses PAUD antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan, lembaga PAUD cenderung lebih banyak dan mudah dijangkau, sementara di daerah pedesaan dan terpencil, ketersediaan lembaga PAUD masih sangat minim. Kondisi ini mengakibatkan anak-anak di wilayah tersebut kesulitan memperoleh layanan pendidikan dini yang esensial. Selain itu, faktor biaya pendidikan PAUD juga menjadi penghalang bagi keluarga dengan tingkat ekonomi rendah. Meskipun pemerintah telah menyediakan program subsidi untuk beberapa lembaga PAUD, cakupan program tersebut dirasa belum merata dan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal.

Tantangan besar lainnya adalah kualitas tenaga pendidik PAUD yang belum mencapai standar optimal. Masih banyak guru PAUD di Indonesia yang belum memiliki kualifikasi yang memadai, baik dari aspek latar belakang pendidikan formal maupun pelatihan khusus yang relevan dengan pengasuhan dan pembelajaran anak usia dini. Tidak sedikit guru PAUD yang hanya memiliki ijazah SMA atau bahkan belum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mendidik anak usia dini secara efektif. Situasi ini berpotensi menghambat proses pembelajaran, Copyright (c) 2025 MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan

mengingat guru yang kurang memiliki pemahaman mendalam mengenai psikologi anak dan metode pembelajaran yang sesuai untuk usia dini akan kesulitan memberikan stimulasi yang tepat. Padahal, kualitas pendidikan pada jenjang ini sangat bergantung pada keterampilan dan pengetahuan guru (Wibowo, 2020).

Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas juga menjadi kendala serius dalam penyelenggaraan PAUD di berbagai daerah. Banyak lembaga PAUD di Indonesia yang masih menghadapi kekurangan fasilitas pendukung proses pembelajaran yang efektif. Beberapa di antaranya tidak memiliki ruang kelas yang representatif, kekurangan peralatan bermain yang edukatif, atau minimnya akses terhadap bahan ajar yang berkualitas. Lingkungan belajar yang tidak kondusif akibat fasilitas yang buruk ini dapat menghambat stimulasi kreativitas dan perkembangan optimal anak. Lebih lanjut, tidak sedikit lembaga PAUD yang menempati bangunan yang belum memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi anak-anak. Infrastruktur yang tidak memadai ini secara langsung berdampak pada mutu layanan pendidikan yang diberikan.

Peran serta orang tua dalam pendidikan anak usia dini sangatlah krusial, namun tingkat keterlibatan mereka seringkali masih rendah. Banyak orang tua yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya PAUD bagi tumbuh kembang anak dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses belajar anak. Kurangnya informasi atau kesadaran mengenai manfaat PAUD menjadi salah satu penyebabnya. Sebagian orang tua masih beranggapan bahwa pendidikan anak usia dini sepenuhnya merupakan tanggung jawab lembaga pendidikan, bukan sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga dan sekolah. Oleh karena itu, diperlukan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran orang tua akan vitalnya peran mereka dalam pendidikan anak di usia emas.

Permasalahan terakhir yang juga signifikan adalah belum meratanya implementasi kurikulum PAUD di seluruh Indonesia. Kurikulum yang diterapkan di berbagai lembaga PAUD masih belum terstandardisasi dengan baik. Beberapa lembaga bahkan masih menggunakan kurikulum yang tidak selaras dengan kebutuhan perkembangan anak usia dini atau tidak mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Variasi kurikulum ini menyebabkan kualitas pendidikan di setiap lembaga PAUD menjadi tidak seragam, baik dari sisi materi pembelajaran, metodologi yang digunakan, maupun tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Idealnya, kurikulum PAUD dirancang secara komprehensif untuk mengakomodasi berbagai aspek perkembangan anak, dengan memberikan penekanan pada pengembangan aspek sosial, emosional, dan kreativitas, di samping kemampuan akademik dasar.

7. Upaya Untuk Mengatasi Problematika PAUD

Upaya peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menuntut perhatian serius terhadap kompetensi para pendidik. Pemerintah memegang peran krusial dalam meningkatkan mutu pelatihan bagi guru PAUD serta memperluas akses bagi mereka untuk memperoleh sertifikasi yang layak. Program pelatihan yang berkelanjutan dan inisiatif pengembangan kapasitas guru secara berkala diyakini dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pengajaran di setiap lembaga PAUD. Lebih dari itu, esensi pelatihan guru PAUD tidak hanya terbatas pada penguasaan materi ajar, tetapi juga harus mencakup pemahaman mendalam mengenai psikologi perkembangan anak dan penguasaan metodologi pengajaran yang inovatif dan sesuai dengan karakteristik unik anak usia dini. Sebagai bentuk apresiasi dan dorongan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan pemberian insentif atau penghargaan bagi tenaga pendidik PAUD yang menunjukkan dedikasi dan komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi profesional mereka (Suryanto, 2016).

Selanjutnya, investasi dalam infrastruktur dan fasilitas PAUD yang memadai merupakan prasyarat untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Baik pemerintah

maupun lembaga swasta diharapkan dapat meningkatkan alokasi sumber daya untuk pengadaan sarana dan prasarana PAUD, dengan fokus utama pada daerah-daerah yang selama ini masih mengalami defisit fasilitas. Prioritas hendaknya diberikan pada penyediaan ruang kelas yang representatif dan aman, ketersediaan alat bantu pendidikan yang beragam dan merangsang, serta jaminan fasilitas sanitasi yang bersih dan sehat. Dukungan berkelanjutan kepada lembaga PAUD dalam hal penyediaan alat permainan edukatif dan bahan ajar yang relevan dengan tahap perkembangan anak juga sangat penting. Dengan fasilitas yang lengkap dan berkualitas, anak-anak akan mendapatkan kesempatan belajar dalam suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan, yang pada gilirannya akan menunjang tumbuh kembang mereka secara holistik.

Tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat mengenai urgensi pendidikan anak usia dini. Sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan mengenai manfaat PAUD perlu digalakkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kampanye pendidikan yang menyasar langsung para orang tua dan komunitas secara luas diharapkan dapat mendorong peningkatan angka partisipasi anak-anak dalam program PAUD. Selain itu, program-program penyuluhan yang dirancang untuk memperdalam pemahaman orang tua tentang peran strategis mereka dalam mendukung pendidikan anak perlu diperkuat dan diperluas jangkauannya. Orang tua yang memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik akan lebih proaktif dalam memberikan stimulasi yang tepat di lingkungan rumah, serta terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga PAUD, menciptakan sinergi positif antara rumah dan sekolah.

Ketersediaan pendanaan yang cukup menjadi pilar fundamental bagi keberlangsungan dan pengembangan PAUD yang berkualitas. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk sektor PAUD, yang mencakup baik kebutuhan operasional sehari-hari maupun investasi dalam pembangunan dan perbaikan fasilitas. Dengan dukungan finansial yang solid, lembaga-lembaga PAUD dapat terus berjalan, berkembang, dan meningkatkan kualitas layanannya. Lebih lanjut, pemerintah perlu secara proaktif berupaya memperluas jangkauan layanan PAUD, terutama di daerah-daerah terpencil atau sulit dijangkau. Pemberian subsidi atau bantuan operasional kepada lembaga PAUD di wilayah tersebut dapat menjadi salah satu solusi efektif. Selain itu, pengembangan model PAUD berbasis komunitas juga patut dipertimbangkan sebagai alternatif strategis untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini secara lebih merata dan partisipatif.

Akhirnya, pengembangan dan implementasi kurikulum PAUD yang terstandarisasi dan relevan di seluruh wilayah Indonesia adalah kunci untuk menjamin kualitas pendidikan yang merata. Pemerintah perlu mengambil peran utama dalam menyusun dan mensosialisasikan kurikulum nasional PAUD yang komprehensif. Kurikulum tersebut harus dirancang untuk menstimulasi pengembangan berbagai aspek dalam diri anak, meliputi kemampuan kognitif, sosial-emosional, bahasa, fisik-motorik, dan seni, serta mampu mengakomodasi keragaman karakteristik anak dan konteks budaya di berbagai daerah. Penguatan standarisasi kurikulum ini bertujuan agar setiap anak Indonesia, di manapun mereka berada, mendapatkan layanan pendidikan usia dini yang berkualitas setara. Kurikulum yang ideal haruslah adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan anak, serta menyeimbangkan antara pengenalan konsep-konsep dasar akademik dengan pembentukan karakter dan nilai-nilai luhur sejak dini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia menghadapi problematika yang kompleks dan saling terkait. Tantangan utama meliputi kualitas dan kuantitas pendidik yang masih rendah, disebabkan oleh minimnya minat akibat kesejahteraan yang belum memadai dan terbatasnya lembaga pencetak

guru berkualitas. Selain itu, akses terhadap layanan PAUD belum merata, dengan infrastruktur yang terbatas khususnya di daerah pedesaan, serta pemahaman masyarakat yang belum optimal terhadap beragam jenis PAUD. Rendahnya kesadaran orang tua akan urgensi PAUD, ditambah dengan mutu pembelajaran yang belum maksimal akibat kurikulum yang belum standar, metode pembelajaran yang kurang inovatif, dan fasilitas pendukung yang minim, menjadi kendala signifikan. Kebijakan pemerintah, baik dari sisi alokasi pendanaan maupun regulasi yang ada, juga dirasa belum sepenuhnya mendukung perkembangan PAUD secara optimal. Oleh karena itu, solusi komprehensif sangat diperlukan, mencakup peningkatan kualitas, kuantitas, dan kesejahteraan pendidik; perluasan akses dan pemerataan infrastruktur melalui peningkatan anggaran pemerintah dan melibatkan aktif pihak swasta. Upaya peningkatan kesadaran dan keterlibatan orang tua, pengembangan kurikulum yang relevan dan metode pembelajaran inovatif, serta penguatan regulasi dan kebijakan pemerintah yang lebih afirmatif dan mendukung, menjadi kunci fundamental untuk perbaikan mutu layanan PAUD secara menyeluruh di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. W., et al. (2021). Problem based learning on Newton's law: Can it improve student creativity? *Jurnal Pendidikan Sains Indonesia*, 9(4), 528–539.
- Britto, P. R., et al. (2017). Nurturing care: Promoting early childhood development. *The Lancet*, 389(10064), 91–102. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31390-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31390-3)
- Center on the Developing Child at Harvard University. (2011). *Building the brain's air traffic control system: How early experiences shape the development of executive function* (Working Paper No. 11). <https://developingchild.harvard.edu/resources/building-the-brains-air-traffic-control-system-how-early-experiences-shape-the-development-of-executive-function/>
- Chalkiadaki, A. (2018). A systematic literature review of 21st century skills and competencies in primary education. *International Journal of Instruction*, 11(3).
- Fivush, R. (2011). The development of autobiographical memory. *Annual Review of Psychology*, 62, 559–582.
- Hamdani, A. (2021). Akses pendidikan anak usia dini di Indonesia: Tantangan dan solusinya. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 16(2), 145–152.
- Hazarika, B., & Hazarika, D. (2019). Impact of pre-school education on scholastic achievement of children at primary level. *International Journal of Research and Analytical Reviews*, 6(1), 845–850.
- Heckman, J. J. (2012). Invest in early childhood development: Reduce deficits, strengthen the economy. *The American Prospect*, 23(5), A10–A13.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pendidikan anak usia dini*.
- Kurniawan, R. Y. (2016). Identifikasi permasalahan pendidikan di Indonesia untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme guru. *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia*, 1415–1420.
- McCain, M. N., et al. (2011). *Early years study 3: Making decisions, taking action*. Council for Early Child Development.
- Ningsih, E. (2018). Masalah sumber daya manusia dalam pendidikan anak usia dini di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 6(3), 103–110.
- Sari, E. Y., & Yulindrasari, H. (2018). Kontribusi sarana prasarana terhadap kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kecamatan Sukasari Kota Bandung. *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 123–134.

- Setiawati, I. (2019). Pengembangan pendidikan anak usia dini di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 11(2), 115–122.
- Supriyanto, Y. (2020). Kendala pendanaan dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(1), 80–87.
- Suryana, D. (2016). Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru PAUD dalam upaya peningkatan mutu layanan PAUD. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 10(1), 1–18.
- Suryanto, B. (2016). Problematika pendidikan anak usia dini di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(2), 59–69.
- UNESCO. (2015). *EFA global monitoring report 2015: Education for all 2000-2015: Achievements and challenges*. UNESCO Publishing.
- Wibowo, A. (2020). Tantangan infrastruktur dalam pendidikan anak usia dini di Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Pendidikan*, 8(1), 50–58.